

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama di daerah pedesaan dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Tingkat kesejahteraan yang rendah ini tercermin dari berbagai indikator sosial dan ekonomi seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 8,57%, atau sekitar 24,06 juta orang. Ketimpangan kesejahteraan terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, di mana angka kemiskinan di desa tercatat sebesar 11,34%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 6,66% di kota.¹

Selain itu, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024 meningkat menjadi 75,02, ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan besar. Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, masih mencatatkan nilai IPM yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah barat.² Di sisi lain, akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi juga belum merata, terutama di daerah terpencil. Bahkan garis kemiskinan di pedesaan tercatat lebih tinggi, yaitu Rp 595.242 per kapita per bulan, dibandingkan dengan Rp 582.932 di daerah perkotaan, menunjukkan bahwa kebutuhan dasar di desa masih sulit terpenuhi secara layak. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dan kelompok rentan, masih membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.

¹ Kesejahteraan Rakyat, "Indikator 2024" 53 (2024).

² Indeks Pembangunan Manusia and I P M Indonesia, "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024," no. 85 (2024).

Untuk memahami lebih lanjut mengenai hubungan antarindikator kesejahteraan, Mosher (1987) menjelaskan bahwa rendahnya tingkat pendapatan masyarakat turut berkontribusi pada menurunnya kualitas kesehatan dan pendidikan, yang ketiganya saling berkaitan erat dalam membentuk kesejahteraan secara menyeluruh.

Ketimpangan kesejahteraan juga tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun IPM Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, disparitas kesejahteraan antarwilayah dan kelompok masyarakat masih terjadi. Pada tahun 2024, IPM nasional tercatat sebesar 75,02, namun capaian tersebut belum merata antara provinsi yang tergolong maju dan daerah tertinggal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Ketimpangan distribusi pembangunan menyebabkan sebagian masyarakat masih berada dalam kondisi miskin dan memiliki kualitas hidup yang rendah.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa permasalahan kesejahteraan tersebut berkaitan erat dengan pendekatan pembangunan yang digunakan. Salah satu pendekatan yang banyak dibahas dalam literatur adalah pemberdayaan masyarakat berbasis desa, yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses Pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Abidin dan Pandodo (2023) yang menyatakan bahwa pendekatan pemberdayaan desa yang tangguh dan partisipatif dapat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif sebagai pelaku utama pembangunan, sehingga mampu meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan keluarga desa.³

Menurut Soetomo (2011: hlm. 2-4), pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri yang bertujuan menggali kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi, dan daya pikir agar masyarakat mampu mengatasi persoalan

³ Zaenal Abidin and Putra Pandodo, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Desa Tangguh Dan Partisipatif Menuju Desa Mandiri," *Akram Gama Bakti: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 23–32, <https://journal.lppm.undaris.ac.id/index.php/AkramBakti/article/view/3/3>.

secara mandiri serta berkuasa atas aspek kehidupannya. Pengelolaan pemberdayaan ini terdiri atas tahap – tahap: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) monitoring, dan (4) evaluasi yang dimulai dari tingkat komunitas terbawah, sehingga masyarakat memiliki kewenangan dalam pengelolaan pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Elliot (1996), terdapat tiga jenis pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) Pendekatan Kesejahteraan, (2) Pendekatan Pembangunan, dan (3) Pendekatan Pemberdayaan. Di samping itu, para ahli juga mengenal pendekatan lainnya yang dibedakan berdasarkan tingkat intervensinya, yakni pendekatan mikro, mezzo, dan makro. Salah satu bentuk nyata pendekatan pemberdayaan adalah melalui kegiatan pendampingan dalam pengelolaan usaha atau bisnis lokal. Pendamping lapangan berperan penting dalam memastikan keberhasilan program, khususnya dalam membangun kapasitas masyarakat agar dapat mandiri secara sosial dan ekonomi.

Dalam realitanya, para peserta pendampingan masih belum optimal dalam proses pendampingan tersebut, yaitu: (1) peserta kurang memiliki motivasi, (2) semangat partisipasi yang rendah, (3) pemahaman yang minim mengenai proses wirausaha, dan (4) keterbatasan keterampilan dalam membangun usaha rintisan. Salah satu penyebab utama belum optimalnya dukungan peserta pendampingan adalah masih terbatasnya kapasitas yang dimiliki oleh para pendamping. Menurut Ali, dkk (2023), kompetensi pendamping mencakup sejumlah aspek penting seperti pengetahuan, keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, serta strategi fasilitasi yang efektif, yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dalam proses pemberdayaan masyarakat.⁴ Adapun menurut Edi Suharto, kapasitas pendamping lapangan yaitu : (1) kapasitas manajerial ; (2) kapasitas teknis ; (3) kapasitas sosial, (4) kapasitas personal.

⁴ Ibis Ali, Aida Vitayala, and S Hubeis Anna, “Pendamping Lokal Desa Di Wilayah Kepulauan,” *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian (JIMDP)* 2748, no. 105 (2023): 78–87.

Dalam konteks pendampingan bisnis di Desa Muara Bakti, Berdasarkan hasil observasi, pengamatan awal, dan wawancara dengan beberapa pendamping serta peserta program yang peneliti lakukan pada tanggal 4 Mei 2024, ditemukan sejumlah permasalahan, antara lain: rendahnya pengetahuan pendamping akan proses pendampingan program, kurangnya keterampilan teknis yang mumpuni pada pendamping, serta strategi fasilitasi yang belum optimal pada proses pendampingan. Rendahnya kapasitas pendamping juga terletak kurangnya kemampuan dalam memimpin anggota Sekar Mukti, serta kurangnya keterampilan teknis dalam melakukan pendampingan. Hal tersebut berakibat pada beberapa kegiatan pendampingan yang tidak berjalan sesuai jadwal, kesulitan pendamping dan anggota tim untuk mencapai kesepakatan mengenai rincian kegiatan, dan minimnya laporan kemajuan pendampingan yang disampaikan oleh masing-masing pendamping.

Selain itu, hambatan juga terjadi akibat letak geografis Desa Muara Bakti yang cukup jauh dari pusat Jakarta (kurang lebih 40 km), sehingga para pendamping yang mayoritas berasal dari Jakarta, khususnya Jakarta Timur, sering kesulitan untuk melakukan pendampingan yang lebih intensif dan tepat waktu. Jarak dan waktu tempuh yang cukup jauh juga turut menjadi penyebab proses koordinasi dan pendampingan tidak berjalan maksimal. Akibatnya, para peserta program merasa kurang terfasilitasi, proses belajar kewirausahaan berjalan lambat, dan mereka juga belum sepenuhnya memahami proses kewirausahaan, sehingga kesulitan untuk mandiri dan mampu membangun usaha rintisan yang lebih matang.

Masalah ini semakin diperparah oleh minimnya keterampilan teknis para pendamping. Hal tersebut tampak, misalnya, dari tidak diberikannya pelatihan yang memadai mengenai proses pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat, sehingga pendamping kesulitan melaksanakan perannya secara maksimal. Selain itu, para pendamping juga berasal dari latar belakang akademis yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks pemberdayaan masyarakat, misalnya berasal dari jurusan Matematika, Biologi, Kimia, atau Tata Busana, sehingga mereka kurang memahami

pendekatan, metodologi, dan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan di lapangan. Keberhasilan sebuah program pemberdayaan masyarakat juga bergantung pada kapasitas pendamping untuk menjalin hubungan yang erat, mampu melakukan proses fasilitasi, dan memberikan kontribusi nyata sesuai kebutuhan masyarakat.

Kondisi tersebut semakin kompleks dengan adanya sistem regenerasi pendamping yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Pergantian personel yang rutin ini menyebabkan terputusnya kontinuitas pendampingan, karena pendamping baru memerlukan waktu kembali untuk beradaptasi dan membangun kedekatan (*rapport*) dengan anggota. Akibatnya, transfer pengetahuan dan keterampilan tidak berjalan optimal, sehingga keberlanjutan kapasitas pendampingan seringkali terhambat oleh proses transisi kepengurusan yang terus berulang setiap tahunnya.

Dalam konteks tersebut, salah satu inisiatif pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan adalah Program Sekar Mukti, atau yang dikenal sebagai Sentra Kreasi Masyarakat Muara Bakti. Program ini berfokus pada pengembangan keterampilan dan usaha masyarakat di bidang perhiasan dan fashion. Program Sekar Mukti merupakan kolaborasi antara PT Cikarang Listrindo, Yayasan Karya Salemba Empat, dan Paguyuban Karya Salemba Empat UNJ sebagai bagian dari implementasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Dalam pelaksanaannya, terdapat enam anggota aktif yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut, dengan pendampingan dari delapan pendamping lapangan yang berasal dari Departemen Community Development Paguyuban Karya Salemba Empat UNJ. Selain menyediakan pelatihan, fasilitas produksi, dan akses pasar, program ini juga menekankan pentingnya proses pendampingan berkelanjutan. Para pendamping memiliki peran strategis sebagai jembatan antara perusahaan, yayasan, dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab memfasilitasi peningkatan kapasitas anggota, menggali potensi lokal, serta memastikan usaha dapat berjalan secara mandiri dan berkembang.

Berdasarkan observasi awal di lapangan, masih ditemukan sejumlah tantangan penting dalam proses pendampingan. Beberapa pendamping mengalami kesulitan dalam memahami kebutuhan spesifik tiap peserta, sehingga pendekatan yang diterapkan cenderung bersifat umum atau *one-size-fits-all*, tanpa disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, atau karakteristik masyarakat Desa Muara Bakti. Misalnya, semua peserta mendapatkan modul dan strategi pendampingan seragam, meskipun tingkat literasi, latar usaha, dan budaya lokal mereka berbeda. Pendekatan seperti ini seringkali kurang efektif dalam konteks pemberdayaan komunitas.

Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa evaluasi dan perbaikan, keberlanjutan program pemberdayaan seperti Sekar Mukti dapat terancam. Pendamping yang tidak mampu menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan masyarakat serta kurangnya variasi dalam strategi pendampingan berpotensi menghambat kemandirian ekonomi warga desa dalam jangka panjang. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan utama program, yakni menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan berdaya.

Dengan latar belakang tersebut, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kapasitas pendamping lapangan dalam menjalankan perannya, khususnya dalam membangun kompetensi usaha rintisan masyarakat yang bergabung di dalam Program Sekar Mukti. Hal ini penting, karena pendamping memegang peranan penting dalam seluruh tahap pengelolaan program pemberdayaan. Suatu hal yang relevan untuk diteliti adalah kapasitas pendamping lapangan dalam membangun kompetensi usaha rintisan masyarakat di Desa Muara Bakti.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkuat peran pendamping lapangan, namun juga menjadi pijakan kebijakan untuk program CSR berkelanjutan yang berbasis pada kemandirian masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kapasitas pendamping lapangan dalam mendukung penguatan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha secara mandiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat di batasi dengan perumusan masalah yang lebih fokus. Permasalahan yang akan menjadi konsentrasi penelitian adalah bagaimana kapasitas pendamping lapangan dalam membangun usaha rintisan pada Program Sekar Mukti di Desa Muara Bakti?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kapasitas pendamping lapangan dalam membangun usaha rintisan pada Program Sekar Mukti di Desa Muara Bakti

D. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu di bidang pemberdayaan masyarakat dan memperkaya literatur mengenai strategi pendampingan usaha masyarakat desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis terkait kapasitas pendamping lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Terpenuhinya salah satu syarat dalam menyelesaikan Skripsi Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta untuk meraih gelar sarjana.
- b. Menjadi bahan evaluasi bagi pendamping lapangan dalam meningkatkan kualitas pendampingan.
- c. Membantu lembaga pelaksana program, seperti Paguyuban KSE UNJ dan PT Cikarang Listrindo, dalam merancang

pelatihan atau penguatan kapasitas pendamping yang lebih tepat sasaran.

- d. Mendorong perbaikan strategi pendampingan agar lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan warga Muara Bakti, sehingga hasil pemberdayaan lebih optimal dan berkelanjutan.
- e. Memberikan inspirasi bagi program sejenis dalam menjalankan pendampingan yang lebih efektif untuk menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

